

Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang
idoarjo laporan keuangan 2025 Kantor pelayanan
kekayaan negara dan lelang sidoarjo laporan
keuangan 2025 Kantor pelayanan kekayaan ne
garadan lelang sidoarjo laporan keuangan 202

**KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SIDOARJO
TAHUNAN
(AUDITED)**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

an keuangan 2024 Kantor pelayanan kekayaan neg
aradan lelang sidoarjo laporan keuangan 2025
Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang
idoarjo laporan keuangan 2025 Kantor pelayanan
kekayaan negara dan lelang sidoarjo laporan
keuangan 2025 Kantor pelayanan kekayaan ne
garadan lelang sidoarjo laporan keuangan 202
5 Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang
sidoarjo laporan keuangan 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidoarjo, 4 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Untung Sudarwanto
NIP 197302271999031001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Pernyataan Tanggung Jawab	6
Ringkasan	7
I. Laporan Realisasi Anggaran	9
II. Neraca	10
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	12
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	40
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel A.1 : Penggolongan Kualitas Piutang	19
Tabel A.2 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	22
Tabel B.1 : Estimasi Pendapatan dan Pagu Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025	26
Tabel B.2 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	27
Tabel B.3 : Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024	28
Tabel B.4 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024	28
Tabel B.5 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024	29
Tabel B.6 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024	30
Tabel B.7 : Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024	30
Tabel B.8 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024	31
Tabel B.9 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024	31
Tabel B.10 : Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024	32
Tabel C.1 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	33
Tabel C.2 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	33
Tabel C.3 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	34
Tabel C.4 : Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima	34
Tabel C.5 : Rincian Persediaan	35
Tabel C.6 : Mutasi Nilai Tanah	35
Tabel C.7 : Rincian Tanah	36
Tabel C.8 : Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin	36
Tabel C.9 : Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan	37
Tabel C.10 : Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya	38
Tabel C.11 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	38
Tabel C.12 : Mutasi Nilai Aset Lain-Lain	39
Tabel C.13 : Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	40
Tabel C.14 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	40
Tabel D.1 : Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2024	41
Tabel D.2 : Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024	42
Tabel D.3 : Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024	42
Tabel D.4 : Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024	43
Tabel D.5 : Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024	43
Tabel D.6 : Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024	44
Tabel D.7 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024	44

Tabel D.8	:	Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024	45
Tabel D.9	:	Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024	45
Tabel E.1	:	Rincian Koreksi Nilai Persediaan	47
Tabel E.2	:	Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap	47
Tabel E.3	:	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	48
Tabel E.4	:	Rincian Koreksi Lain-Lain	48

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2025 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, 4 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Untung Sudarwanto
NIP 197302271999031001

Laporan Keuangan Audited Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp33.690.102.678 atau mencapai 193,65 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp17.397.047.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.344.864.757 atau mencapai 37,47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp8.937.408.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp26.816.747.237 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.794.117.892 dan Aset Tetap (netto) sebesar Rp23.202.343.855.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.079.576.498 dan Rp22.991.642.345.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp33.879.369.376, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.696.055.532 sehingga terdapat Surplus dari

Kegiatan Operasional senilai Rp30.183.313.844. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp30.183.313.844.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp23.213.462.254 dikurangi Surplus-LO sebesar Rp11.017.350.272 dan ditambah koreksi-koreksi senilai Rp0 serta ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(10.887.997.364) sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp23.342.815.162.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% thd Angg	2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	17.397.047.000	33.690.102.678	82	14.268.772.300
JUMLAH PENDAPATAN		17.397.047.000	33.690.102.678	82	14.268.772.300
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0	-
Belanja Barang	B.4	3.663.952.000	3.187.047.257	94	2.832.611.776
Belanja Modal	B.5	5.273.456.000	157.817.500	98	537.750.660
JUMLAH BELANJA		8.937.408.000	3.344.864.757	96	3.370.362.436

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	3.450.416.452	1.057.460.000
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	253.811.454	64.544.756
Persediaan	C.5	89.889.986	98.043.049
Jumlah Aset Lancar		3.794.117.892	1.220.047.805
ASET TETAP			
Tanah	C.6	13.488.990.591	13.488.990.591
Peralatan dan Mesin	C.7	5.517.319.369	5.734.951.169
Gedung dan Bangunan	C.8	10.918.775.100	10.918.775.100
Aset Tetap Lainnya	C.9	11.921.965	11.921.965
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(6.945.364.680)	(6.952.294.970)
Jumlah Aset Tetap		22.991.642.345	23.202.343.855
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.11	1.325.621.546	823.996.546
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(1.294.634.546)	(823.996.546)
Jumlah Aset Lainnya		30.987.000	-
JUMLAH ASET		26.816.747.237,00	24.422.391.660
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	3.452.101.104,00	1.079.516.498
Utang Jangka Pendek Lainnya			60.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.452.101.104,00	1.079.516.498
JUMLAH KEWAJIBAN		3.452.101.104,00	1.079.516.498
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	23.364.646.133	23.342.815.162
JUMLAH EKUITAS		23.364.646.133	23.342.815.162
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		26.816.747.237,00	24.422.331.660

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	33.879.369.376	14.333.317.056
JUMLAH PENDAPATAN		33.879.369.376	14.333.317.056
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	92.922.184	40.704.040
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.494.988.801	1.625.303.188
Beban Pemeliharaan	D.5	904.001.192	506.727.400
Beban Perjalanan Dinas	D.6	701.701.895	626.951.726
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	502.441.460	516.280.430
JUMLAH BEBAN		3.696.055.532	3.315.966.784
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		30.183.313.844	11.017.350.272
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		30.183.313.844	11.017.350.272
POS LUAR BIASA	D.9		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		30.183.313.844	11.017.350.272

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	23.342.815.162	23.213.462.254
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	30.183.313.844	11.017.350.272
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI	E.3	-	-
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.5	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.7	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.8	38.733.750	-
JUMLAH		38.733.750	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		(30.200.216.623)	(10.887.997.364)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		21.830.971	125.352.908
EKUITAS AKHIR	E.9	23.364.646.133	23.342.815.162

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Entitas berkedudukan di Jalan Erlangga Nomor 161 Sidoarjo.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”***

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada

Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo. Laporan Keuangan *Audited* ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan *Audited* ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi

sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Klas I dan bea lelang pegadaian diakui pada saat penetapan pemenang lelang.
 - Pendapatan biaya pengelolaan piutang dan lelang negara diakui pada saat diterbitkannya PJPN (Penetapan Jumlah Piutang Negara).
 - Pendapatan jasa lainnya yaitu pendapatan atas biaya Kutipan Risalah Lelang.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari

KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan

sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak	10%

	dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo memperoleh alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp8.937.408.000. Adapun anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel B.1. Estimasi Pendapatan dan Pagu Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025

Uraian	31 Desember 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.397.047.000	17.397.047.000
Jumlah Pendapatan	17.397.047.000	17.397.047.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	-
Belanja Barang	3.663.952.000	3.663.952.000
Belanja Modal	5.273.456.000	5.273.456.000
Jumlah Belanja	8.937.408.000	8.937.408.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp33.690.102.678*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp33.690.102.678 atau mencapai 193,65 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp17.397.047.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan, Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel B.2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	500.000	
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	15.754.501.000	31.832.480.651	202,05
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.575.450.000	1.792.682.664	113,79
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	67.096.000	64.419.363	96,01
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-	20.000	-
Jumlah	17.397.047.000	33.690.102.678	193,65

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 136,11% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan adanya kenaikan signifikan pada pendapatan bea Lelang pejabat Lelang kelas I.

Tabel B.3. Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000	1.000.000	-0,50
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	31.832.480.651	12.429.181.527	156,11
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.792.682.664	1.643.779.192	9
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	64.419.363	194.805.527	-66,93
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	20.000	6.054	
Jumlah	33.690.102.678	14.268.772.300	136,11

B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
Rp3.344.864.757*

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.344.864.757 atau 37,43% dari anggaran belanja sebesar Rp8.937.408.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel B.4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	3.663.952.000	3.187.047.257	86,98
Belanja Modal	5.273.456.000	157.817.500	-
Total Belanja Kotor	8.937.408.000	3.344.864.757	37,43
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	8.937.408.000	3.344.864.757	37,43

Realisasi Belanja untuk periode akhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 0,76 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024, hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya belanja modal yang direalisasikan dikarenakan terdapat refocusing belanja terutama untuk belanja modal sehingga beberapa item belanja modal dilakukan carry over untuk tahun anggaran 2026.
2. Meningkatnya belanja barang mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Tabel B.5. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	3.187.047.257	2.832.611.776	12,51
Belanja Modal	157.817.500	537.750.660	-
Jumlah	3.344.864.757	3.370.362.436	(0,76)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp0 Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak ada realisasi belanja pegawai TA 2025 dikarenakan belanja pegawai sudah terpusat di tahun 2022.

Tabel B.6. Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp3.162.117.257 Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.162.117.257 dan Rp2.832.611.776. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 12,51% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan meningkatnya pemeliharaan barang dan belanja perjalanan dalam negeri.

Tabel B.7. Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.331.389.267	1.154.995.513	15,27
Belanja Barang Non Operasional	126.195.606	190.260.997	(33,67)
Belanja Barang Persediaan	84.769.121	71.161.136	19,12
Belanja Jasa	38.990.176	282.515.004	(86,20)
Belanja Pemeliharaan	904.001.192	506.727.400	78,40
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	701.701.895	626.951.726	11,92
Jumlah Belanja Kotor	3.187.047.257	2.832.611.776	12,51
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	3.187.047.257	2.832.611.776	12,51

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp157.817.500

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp157.817.500 dan Rp537.750.660. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel B.8. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	157.817.500	537.750.660	(70,65)
Jumlah Belanja Kotor	157.817.500	537.750.660	(70,7)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	157.817.500	537.750.660	(70,7)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp157.817.500. Realisasi belanja modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 70,7 persen dibandingkan TA 2024, hal ini disebabkan oleh kebijakan refocusing anggaran pada awal tahun terutama untuk belanja modal, sehingga belanja modal dilakukan

pemindahan pelaksanaan di tahun 2026.

Tabel B.9. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.817.500	537.750.660	-70,65
Jumlah Belanja Kotor	157.817.500	537.750.660	-70,65
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	157.817.500	537.750.660	-70,65

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran belanja modal gedung dan bangunan di Tahun Anggaran 2025.

Tabel B.10. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi TA 2025	Realisasi 2024	TA	NAIK (TURUN) %
Rehabilitasi Gedung Kantor	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel C.1. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	-	-
Bank Mandiri Rekening Nomor 1410016639965	-	-
Bank Mandiri Rekening Nomor 8100125062761000	-	-
Kuitansi UP yang belum di SPM GU kan	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel C.2. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	-	-
Bank BRI Rek. No : 008601000789307	-	-
Bank Mandiri Rek No : 1420002032539	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.450.416.452 dan Rp1.057.460.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara penerimaan. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan dikarenakan uang jaminan pemenang lelang. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.3. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	3.450.416.452,00	1.057.460.000,00
Jumlah	3.450.416.452,00	1.057.460.000

C.4 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp253.811.454 dan Rp64.544.756 .
Rp253.811.454

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yaitu pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara.

Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada tanggal Pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel C.4. Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	253.811.454	64.544.756
Jumlah	253.811.454	64.544.756

C.5 Persediaan

Persediaan
Rp89.889.986

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp89.889.986 dan Rp98.043.049.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5. Rincian Persediaan

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	89.889.986	98.043.049
Jumlah	89.889.986	98.043.049

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.6 Tanah

Tanah
Rp13.488.990.591

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.488.990.591 dan Rp13.488.990.591.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.6. Mutasi Nilai Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	13.488.990.591
Mutasi tambah:	
	0
Mutasi kurang:	
	0
Saldo per 31 Desember 2025	13.488.990.591

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel C.7. Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.000 m2	Jalan Erlangga Nomor 161 Sidoarjo	13.488.990.591
Jumlah			13.488.990.591

C.7 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp5.517.319.369*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp5.517.319.369 dan Rp5.734.951.169 . Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.8. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	5.734.951.169
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	157.817.500
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	(375.449.300)
Saldo per 31 Desember 2025	5.517.319.369
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(4.730.880.450)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	786.438.919

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Penambahan dari transfer masuk, yaitu antara lain :
 - a. Pembelian kursi pegawai senilai Rp52.479.000;
 - b. Pembelian LCD Projector senilai Rp9.990.000;
 - c. Pembelian Microphone senilai Rp9.990.000;

- d. Pembelian AC 1/2PK senilai 27.472.500;
 - e. Pembelian money counter senilai Rp2.886.000;
 - f. Pembelian kendaraan dinas roda 2 senilai Rp55.000.000
- Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan asset senilai Rp375.449.300

C.8 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp10.918.775.100*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp10.918.775.100 dan Rp10.918.775.100. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.9. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	10.918.775.100
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
Revaluasi BMN	-
Saldo per 31 Desember 2025	10.918.775.100
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(2.214.484.230)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	8.704.290.870

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp11.921.965*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp11.921.965 dan Rp11.921.965. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian (lukisan) dan buku perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap lainnya untuk periode 31 Desember 2025. Mutasi atas aset tetap ini untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu :

Tabel C.10. Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	11.921.965
Mutasi tambah:	
Penambahan Jaringan	-
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	11.921.965
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	11.921.965

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp6.945.364.680*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing Rp6.945.364.680 dan Rp6.952.294.971. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel C.11. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.517.319.369	4.730.880.450	786.438.919
2	Gedung dan Bangunan	10.918.775.100	2.214.484.230	8.704.290.870
4	Aset Tetap Lainnya	11.921.965	0	11.921.965
Akumulasi Penyusutan		16.448.016.434	6.945.364.680	9.502.651.754

C.11 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.325.621.546 dan Rp823.996.546. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel C.12. Mutasi Nilai Aset Lain-Lain

Saldo per 31 Desember 2024	823.996.546
Mutasi tambah:	
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	501.625.000
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan (BMN yang dihentikan)	-
Saldo per 31 Desember 2024	1.325.621.546
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	(1.294.634.546)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	30.987.000

C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya*
Rp1.294.634.546

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp1.294.634.546 dan Rp823.996.546. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel C.13. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi
Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	1.325.621.546	1.294.634.546	30.987.000
Jumlah	1.325.621.546	1.294.634.546	30.987.000

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp3.452.101.104*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.452.101.104 dan Rp1.079.576.498. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.14. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Jaminan Lelang	3.450.416.452,00	Uang Jaminan Lelang
Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	-	-
Belanja Barang yang masih harus di bayar	1.684.652,00	Tagihan PDAM dan Pos
Total	3.452.101.104,00	

C.14 Ekuitas

*Ekuitas
Rp23.364.646.133*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23.364.646.133 dan Rp23.342.815.162. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP
Rp33.879.369.376

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp33.879.369.376 dan Rp14.333.317.056. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel D.1. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2025 dan 2024*

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-	100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000	1.000.000	(50,0)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	-		#DIV/0!
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Kelas I	32.025.132.105	12.490.341.527	156,40
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.789.297.908	1.647.163.948	8,63
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	64.419.363	194.805.527	(66,93)
Pendapatan Anggaran Lain- Lain	20.000	6.054	230,36
Jumlah	33.879.369.376	14.333.317.056	136,37

Pendapatan Jasa berasal dari biaya pengurusan piutang negara dan bea lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Sidoarjo. Pendapatan Jasa Lainnya berasal dari bea lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pegadaian, biaya penggantian Kutipan Risalah dan wanprestasi lelang.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0 Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel D.2. Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	#DIV/0!
Beban Lembur	-	-	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp92.922.184 Jumlah Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp92.922.184 dan Rp40.704.040. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.3. Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	92.922.184	40.704.040	128,29
Jumlah Beban Persediaan	92.922.184	40.704.040	128,29

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp1.494.988.801*

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.494.988.801 dan Rp1.625.303.188. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.4. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.112.729.644	1.033.590.231	7,66
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	22.248.288	5.283.442	321,09
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.941.000	25.004.500	-36,25
Beban Honor Operasional Lainnya	138.480.000	83.256.000	66,33
Beban Barang Operasional Lainnya	41.151.835	8.706.840	372,64
Beban Bahan	58.210.606	129.060.997	-54,90
Beban Barang Non Operasional	67.985.000	61.200.000	11,09
Beban Langganan Daya dan Jasa	18.262.428	278.851.178	-93,45
Beban Jasa Sewa	19.980.000	0	#DIV/0!
Beban Jasa Profesi	0	350.000	-100,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	
Jumlah	1.494.988.801	1.625.303.188	-8,02

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp904.001.192*

Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp904.001.192 dan Rp506.727.400. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.5. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	594.402.750	243.601.770	144,01
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	309.598.442	263.125.630	17,66
Jumlah	904.001.192	506.727.400	78,40

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp701.701.895*

Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp701.701.895 dan Rp626.951.726. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	633.841.895	572.271.726	10,76
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.860.000	54.680.000	24,10
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah	701.701.895	626.951.726	11,92

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp502.441.460*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp502.441.460 dan Rp516.280.430.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.7. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	262.499.021	280.211.366	(6,32)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	236.069.064	236.069.064	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	3.873.375	-	-
Jumlah Penyusutan	502.441.460	516.280.430	(2,68)
			-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	502.441.460	516.280.430	(2,68)

D.8 Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.8. Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2025 dan 2024*

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	-	#DIV/0!

D.9 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9. Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp23.342.815.162*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23.342.815.162 dan Rp23.213.462.254.

E.2 Surplus /Defisit LO

*Surplus/Defisit
LO
Rp30.183.313.844*

Jumlah Surplus / Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp30.183.313.844 dan Rp11.017.350.272. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

*Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi Rp0*

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0

*Penyesuaian
Nilai Aset Rp0*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel E.1. Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan pencatatan selisih atas penilaian kembali aset sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel E.2. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Selisih Revaluasi
Tanah	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

E.4.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp38.733.750

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp38.733.750 dan Rp0. Rincian untuk periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel E.3. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis Aset	Jumlah Koreksi
Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	38.733.750
Koreksi nilai aset lainnya non revaluasi	-
Jumlah	38.733.750

E.4.5 Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

Nilai Koreksi Lain-lain untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian untuk periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel E.4. Rincian Koreksi Lain-Lain

Uraian Koreksi	Jumlah Koreksi
	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas
Rp30.200.216.6
23*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp30.200.216.623 dan Rp10.887.997.364.

E.9 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp23.364.646.133*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23.364.646.133 dan Rp23.342.815.162.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo adalah sebagai berikut :
 - Bank Mandiri Sidoarjo Pahlawan Nomor Rekening 142.00.0203253.9 yaitu rekening penampungan untuk lelang Bendahara Penerimaan.
 - Bank BRI Sidoarjo Nomor Rekening 0086.01.000789.30.7 yaitu rekening penampungan untuk piutang Bendahara Penerimaan.
 - Bank Mandiri Sidoarjo Nomor Rekening 8100125062761000 yaitu rekening penampungan uang persediaan Bendahara Pengeluaran.
 - Bank Mandiri Sidoarjo Nomor Rekening 1410016639965 yaitu rekening penampungan sementara uang tunjangan kinerja Bendahara Pengeluaran.